

MODERNISASI ARAB SAUDI ERA MUHAMMAD BIN SALMAN

*Siti Sarah¹, Nana Fitriana Arifin², Elza Ramona,³ Yusril Fahmi Adam⁴

¹⁻⁴Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Email: 21201022006@student.uin-suka.ac.id

Abstract: This research aims to examine the modernization that occurred in Saudi Arabia under the leadership of Muhammad bin Salman. The modernization of Saudi Arabia in the era of Muhammad bin Salman became important for Muhammad bin Salman's political attitude, which tended to be open to foreign cultures and move away from Wahhabism values that had been ingrained in Saudi Arabian culture. To support the analysis in the research, this article uses a historical approach and modernization theory. Through this approach and theory, this research is not only narrative-descriptive but more analytical-descriptive. The findings in this research are that the Wahhabism doctrine that developed in Saudi Arabia had a major impact not only on socio-religious aspects but also on political aspects. Through the Saudi royal authorities and Wahhabi clerics, everything that is not in accordance with the values of Wahhabism will be considered wrong and outside the pure teachings of Islam. This condition lasted until the end of King Salman's time and changed during the time of Muhammad bin Salman due to the modernity implemented in the Arab Vision 2030.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji modernisasi yang terjadi di Arab Saudi di bawah kepemimpinan Muhammad bin Salman. Modernisasi Arab Saudi di era Muhammad bin Salman menjadi penting sikap politik dari Muhammad bin Salman yang cenderung kepada keterbukaan terhadap kebudayaan luar dan keluar dari nilai-nilai Wahhabisme yang selama ini telah mengakar dalam budaya Arab Saudi. Untuk mendukung analisis dalam penelitian, artikel ini menggunakan pendekatan sejarah dan teori modernisasi. Melalui pendekatan dan teori tersebut, penelitian ini tidak hanya bersifat naratif-deskriptif, melainkan lebih kepada analitis-deskriptif. Temuan dalam penelitian ini adalah, bahwa doktrin Wahhabisme yang berkembang di Arab Saudi memberikan dampak besar tidak hanya bagi sosial-keagamaan, melainkan juga aspek politik. Melalui otoritas kerajaan Saudi dan ulama Wahhabi, segala sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Wahhabisme akan dianggap salah dan keluar dari ajaran Islam yang murni. Kondisi tersebut berlangsung hingga berakhirnya masa Raja Salman dan berubah pada masa Muhammad bin Salman akibat modernitas yang diimplementasikan dalam Visi Arab 2030.

Kata Kunci: Arab Saudi, Modernisme, Muhammad bin Salman, Wahhabisme

Pendahuluan

Jazirah Arab merupakan wilayah yang memiliki catatan historis yang panjang bagi umat Islam, bahkan dunia. Berbagai agama samawi diturunkan di wilayah jazirah Arab, termasuk agama Islam. Agama Islam yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw berkembang di wilayah Arab dan memberikan dampak bagi peradaban Islam hingga ke seluruh dunia.¹ Di jazirah Arab, Nabi Muhammad Saw sebagai *pioneer, role model*, serta pembawa revolusi sosial

¹ Phillip K Hitti, *History of The Arabs* (Jakarta: Serambi, 2008), 125.

berhasil mengubah kondisi masyarakat Arab pra-Islam² yang dikenal sebagai masyarakat *jahiliyyah*³ (kebodohan), menjadi masyarakat yang memiliki *akhlaqul karimah*.⁴ Nabi Muhammad Saw merupakan tokoh sentral yang berhasil membangun kebudayaan serta peradaban Islam dalam aspek sosial, politik, dan ekonomi di wilayah Arab.⁵

Pengaruh dakwah Nabi Muhammad Saw di jazirah Arab kemudian dilanjutkan oleh Khulafa al-Rasyidin, Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyah⁶, hingga terbentuknya masa Arab Sa'udiyah (Bani Saudi) pada abad ke-15 M. Sebagai wilayah yang memiliki dua kota suci, yakni Mekah dan Madinah, Arab Saudi merupakan wilayah yang paling kuat dalam menjaga tradisi nilai-nilai Islam, terutama dalam hal ritual peribadatan.⁷ Pada abad ke-17, terdapat tokoh yang bernama Muhammad bin Abd al-Wahhab (1703-1792) yang mencetuskan doktrin Wahhabisme.⁸ Wahhabisme merupakan reaksi terhadap suasana politik umat Islam yang dinilai jauh dari nilai-nilai tauhid yang murni.⁹ Melalui Wahhabisme, Muhammad bin Abd al-Wahhab berupaya untuk menghilangkan segala perbuatan *syirik* (menyekutukan Allah Swt) dan berdakwah untuk menegakkan pemurnian Islam yang sesungguhnya sesuai Al-Qur'an dan Hadits.¹⁰ Purifikasi Islam yang dilakukan oleh Abd al-Wahhab mendapatkan legitimasi oleh raja Arab Saudi, yakni Muhammad Ibn al-Saud. Melalui otoritas kerajaan, Wahhabisme berhasil berkembang hingga ke seluruh lapisan masyarakat Arab Saudi.¹¹

Doktrin Wahhabisme yang tersebar di Arab Saudi menyebabkan kondisi sosial-keagamaan menjadi lebih konservatif dan bersifat fundamentalis. Wahhabisme Abd al-Wahhab mendapatkan pengaruh yang kuat dari Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Taimiyah, sehingga Wahhabisme kental akan nuansa "*Islam Salaf al-Salih*" (ulama salih generasi awal).¹² Doktrin

² M. Ira Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 177.

³ Machasin menyebutkan bahwa Jahiliyyah memiliki makna perilaku orang bodoh atau naif yang tidak mampu melihat persoalan dengan cermat, mendalam, dan mencakup, sehingga tindakan yang muncul daripadanya dilandasi dengan emosi, prasangka, keinginan, dan sebagainya. Berdasarkan pengertian tersebut, bukan berarti masyarakat Arab pra-Islam bodoh secara intelektual, namun secara akhlak yang jauh dari unsur kemanusiaan. Lihat Machasin, *Dari Dakwah Ke Khilafah: Perjalanan Islam Dari Seruan Perbaikan Sosial Sampai Terbentuknya Kekuasaan Politik* (Yogyakarta, 2018), 1.

⁴ M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran Dan Peradaban Islam*, Cetakan ke-VIII (Yogyakarta: Pustaka Book, 2019), 17.

⁵ M. Abdul Karim, *Bulan Sabit Di Gurun Gobi: Sejarah Dinasti Mongol-Islam Di Asia Tengah* (Yogyakarta: Suka Press, 2014), 12.

⁶ Muhammad Abdul Karim, "Baghdad's Fall and Its Aftermath: Contesting the Central Asian Political Background and the Emergence of Islamic Mongol Dynasties," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* Vol. 56, No. 1 (2018): 187–224, <https://doi.org/10.14421/ajis.2018.561.187-224>.

⁷ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah Abad XVII-XVIII*, Perennial (Jakarta: Kencana, 2016), 54.

⁸ Inayah Rohmaniyah & Mark Woodward, "Wahhabism, Identity and Secular Ritual: Graduation at an Indonesian High School," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* Vol. 50, No. 1 (2012): 119–46, <https://doi.org/doi.org/10.14421/ajis.2012.501.119-145>.

⁹ Jajang Jahroni, "Saudi Arabia Charity and the Institutionalization of Indonesian Salafism," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* Vol. 58, No. 1 (2020): 40, <https://doi.org/10.14421/ajis.2020.581.35-62>.

¹⁰ Jajang Jahroni, "Ritual, Bid'ah, and Negotiation of the Public Sphere in Contemporary Indonesia," *Studia Islamika* Vol. 25, No. 1 (2018): 1–36, <https://doi.org/10.15408/sdi.v25i1.5308>.

¹¹ Carol E.B and Jamshed K Choksy Choksy, "The Saudi Connection: Wahhabism and Global Jihad," *World Affairs* Vol. 178, No. 1 (2015): 23–34.

¹² Markus Holdo, "Post-Islamism and Fields of Contention After the Arab Spring: Feminism, Salafism and the Revolutionary Youth," *Third World Quarterly* Vol. 38, no. 8 (2016): 9, <https://doi.org/doi.org/10.1080/01436597.2016.1233492>.

Wahhabisme yang mendapatkan otoritas kerajaan ini kemudian memberikan dampak yang besar bagi masyarakat Arab Saudi dalam aspek sosial-keagamaan, budaya, bahkan politik. Segala sesuatu yang dinilai bertentangan dari ideologi Wahhabisme, maka hal tersebut akan dilarang oleh negara. Eksistensi Wahhabisme mempengaruhi masyarakat Arab Saudi terus berlangsung hingga era kontemporer dan perlahan mulai berubah tatkala Pangeran Muhammad bin Salman melanjutkan tahta tertinggi kerajaan Arab Saudi pada tahun 2015. Di era Muhammad bin Salman, secara implisit maupun eksplisit terdapat kebijakan yang dinilai bertentangan dengan faham Wahhabisme yang selama ini berkembang, terutama setelah muncul *Saudi Vision 2030* oleh sang putera mahkota tersebut yang menurutnya adalah modernisme di dunia Arab.¹³ Dalam konteks modernisme dunia Arab, penelitian ini bertujuan untuk mengkajinya sebagai sebuah diskursus modernisme di Arab Saudi yang dilakukan Muhammad bin Salman melalui berbagai regulasinya yang dianggap keluar dari nilai-nilai Wahhabisme dan menghasilkan wajah Arab baru, yakni Arab yang lebih modern.

Diskursus tentang dunia Arab telah ditulis oleh beberapa sarjana, misalnya adalah karya Ibnu Burdah (2020) yang berjudul *Quo Vadis Dunia Arab Kontemporer? Gerakan Protes, Politik Muslim, Covid-19, dan Arah Perubahan*.¹⁴ Dalam penelitian tersebut, Burdah menjelaskan bagaimana kondisi politik di Arab Saudi di era kontemporer, namun belum menjelaskan secara rinci bagaimana peran Muhammad bin Salman sebagai penggerak modernisasi di Arab Saudi. Studi selanjutnya adalah dari Abdullah (2019) yang berjudul *Dinamika Islam di Arab Saudi*¹⁵ dan Imam Wahyuddin (2018) yang berjudul *Perkembangan Islam Arab Saudi*.¹⁶ Kedua diskursus tersebut membicarakan Arab Saudi sebagai objek formal penelitian, terutama tentang Wahhabisme yang merebak di kalangan masyarakat Arab dan doktrin Wahhabisme yang telah tersebar ke berbagai negara Muslim, termasuk ke Indonesia. Selain itu, terdapat juga penelitian dari Imam Hendriyadi (2020) yang berjudul *Wahhabisme: Gerakan Revivalist Islam*.¹⁷ Dalam penelitiannya, Hendriyadi menitikberatkan Wahhabisme sebagai gerakan yang memberikan implikasi terhadap perpolitikan, bahkan sosial-keagamaan Arab Saudi.

Berdasarkan literatur terdahulu di atas, penulis berasumsi bahwa penelitian yang membahas tentang modernisasi Arab Saudi era Pangeran Muhammad bin Salman belum ditemukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi *gap* penelitian yang masih kosong. Pada dasarnya, penelitian tentang Arab Saudi lebih banyak mengkaji tentang gerakan Wahhabisme yang memberikan dampak signifikan bagi perpolitikan Arab Saudi dan negara Muslim di dunia. Namun di dalam penelitian ini, penulis tidak hanya menganalisis tentang

¹³ Ecaterina Matoi & Diana Monica, "Muhammad Bin Salman's Reforms vs Wahhabi Rules: A Challenge for the Status Quo of the Saudi State?," *Strategies XXI: International Scientific Conference* Vol. 14, No. 15 (November 2019): 235–248.

¹⁴ Ibnu Burdah, *Quo Vadis Dunia Arab Kontemporer? Gerakan Protes, Politik Muslim, Covid-19, Dan Arah Perubahan* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020).

¹⁵ Abdullah, "Dinamika Islam di Arab Saudi," *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner* 4, no. 1 (June 30, 2019): 152–71, <https://doi.org/10.30603/jiaj.v4i1.828>.

¹⁶ Imam Wahyuddin, "Perkembangan Islam Arab Saudi," *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* Vol. 10, No. 2 (2018): 423–41.

¹⁷ Hendriyadi, "Wahabisme: Gerakan Revivalist Islam," *Tafhim Al-Ilmi* Vol. 11, No. 2 (2020): 324–33, <https://doi.org/10.37459/tafhim.v11i2.3759>.

Wahhabisme, melainkan sikap politik Muhammad bin Salman melalui *Saudi Vision 2030* yang cenderung keluar dari nilai-nilai Wahhabisme akibat modernisasi yang diimplementasikan dalam kebijakan-kebijakannya menuju Arab Saudi kosmopolit tahun 2030, sehingga hal tersebut yang menjadikan penelitian ini menjadi penting.

Metode

Artikel ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*).¹⁸ Dalam pengumpulan data, penulis melakukan penelusuran lebih dalam tentang informasi dunia Arab kontemporer, terlebih lagi pada masa Muhammad bin Salman melalui buku-buku, jurnal, dan berita terkini tentang kebijakannya dalam media cetak maupun media sosial.¹⁹ Untuk membantu analisis dalam penelitian, artikel ini menggunakan pendekatan sejarah. Pendekatan sejarah digunakan untuk menganalisis gejala-gejala historis yang ditimbulkan oleh Muhammad bin Salman dalam modernisasi yang dilakukannya untuk *Saudi Vision 2030*.²⁰ Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori modernisme untuk memberikan analisis yang lebih dalam tentang modernisme yang tercermin pada sikap Muhammad bin Salman di dalam rasionalisme kebijakannya yang dinilai telah keluar dari nilai-nilai Wahhabisme yang selama ini telah mengakar di Arab Saudi.²¹ Melalui pendekatan dan teori tersebut, penelitian ini tidak hanya bersifat naratif-deskriptif, melainkan lebih kepada analitis-deskriptif karena dalam prosesnya menggunakan pendekatan serta teori multidisipliner.²²

Hasil dan Pembahasan

Perkembangan Arab Saudi di Masa Modern

Al-Mamlakah al-Arabiah al-Su'udiah atau dikenal dengan Arab Saudi atau *Kingdom of Saudi Arabia*²³ dengan ibu kotanya, Riyadh.²⁴ Arab Saudi terletak di Asia Barat yang mencakup hampir keseluruhan wilayah Semenanjung Arabia. Dengan luas wilayah kira-kira 2150000 km², menjadikan Arab Saudi sebagai negara terbesar ke lima di Asia dan kedua terbesar di Dunia Arab setelah Aljazair. Arab Saudi berbatasan langsung dengan Yordania dan Irak ke utara, Kuwait ke timur laut, Qatar, Bahrain, dan Uni Emirat Arab ke timur, Oman ke tenggara, dan Yaman ke selatan. Negara ini terpisah dengan Israel dan Mesir oleh Teluk Aqaba. Selain itu,

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), 7.

¹⁹ Dien dan Johan Wahyudi Madjid, *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014), 222.

²⁰ Mary Fullbrook, *Historical Theory* (USA: Routledge, 2002), 122.

²¹ Prateek Goorha, "Modernization Theory," *Oxford Research Encyclopedia*, 2010, 1–24, <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.266>.

²² F.R Ankersmit, *Refleksi Tentang Sejarah: Pendapat-Pendapat Modern Tentang Filsafat Sejarah*, Terjemahan Dick Hartono (Jakarta: PT Gramedia, 1987), 247.

²³ Abu Yazid Hamdani, "Debut Politik Muhammad Ibn Abdul Wahhab & Muhammad Ibn Saud," *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin* Vol. 1, No. 2 (2019): 176–84, <https://doi.org/doi/10.32939/ishlah.v1i2.38>.

²⁴ Kota Riyadh berada di wilayah tengah Najd. Di wilayah tersebut banyak terjadi aktivitas-aktivitas politik. Masyarakat Arab di kawasan tengah ini memiliki pandangan yang cukup tajam dan berbeda dengan dunia luar, sehingga mereka berjaga-jaga lebih kuat dan mandiri untuk menghindari ancaman dari luar untuk masuk ke wilayahnya. Pada wilayah selatan, yaitu terdiri dari Kota Abha, Jizan dan Najran yang merupakan kota yang paling padat penduduknya di Arab Saudi. Wilayah ini merupakan perbukitan sehingga masyarakat di sana banyak yang tinggal di desa-desa yang terbuat dari batu-batuan. Masyarakat ini dikenal sebagai orang yang bekerja keras seperti berladang di bukit, lihat Citra Nur Hikmah & Abrar & Citra Nur Hikmah, "Saudi Vision: Reformasi Ekonomi Arab Saudi," *Periode: Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah* Vol. 1, No. 1 (2019): 27–39.

Arab Saudi juga menjadi satu-satunya negara yang memiliki dua pesisir penting, yakni Laut Merah dan Teluk Persia, dan sebagian besar wilayahnya merupakan gurun pasir.²⁵

Sebelum menjadi negara yang paling sentral di Timur Tengah, baik secara politik, sosial, ekonomi, maupun keagamaan, Arab Saudi merupakan negara yang dikelola secara sederhana. Pada tahun 1952, Arab Saudi hanya ditopang oleh tiga kementerian, yaitu kementerian keuangan yang dibentuk pada tahun 1932, kementerian luar negeri yang dibentuk pada tahun 1933, dan kementerian dalam negeri yang berdiri pada tahun 1944. Sebagai negara, Arab Saudi nyaris tidak memiliki anggaran yang cukup untuk hadir dengan program-program pembangunan di tengah masyarakat, tetapi melanggengkan status keluarga kerajaan sebagai ahli waris secara politik dan sosial-keagamaan.²⁶

Basis perubahan sosial-ekonomi Arab Saudi secara umum berasal dari sumber daya alam.²⁷ Pada tahun 1938 di Arab Saudi ditemukan ladang-ladang minyak bumi di gurun pasir dan menjadikan Arab Saudi sebagai negara penghasil dan pengekspor minyak bumi terbesar di dunia.²⁸ Kekayaan negara yang dihasilkan dari minyak bumi sangat membantu menyokong pembentukan dan pertahanan negara. Pendapatan Arab Saudi dari produksi minyak yang terbesar baru terjadi pada tahun 1973-1974, ketika dunia Barat mengalami krisis minyak bumi. Hal itu dipicu oleh perang Arab-Israel²⁹, pada saat itu negara-negara Arab yang tergabung dalam *Organization of Petroleum Exporting Countries* (OPEC) melakukan embargo minyak bumi terhadap Amerika Serikat dan negara lainnya yang memberi dukungan pada Israel.³⁰ Akibatnya harga minyak bumi dunia meroket hingga mencapai empat kali lipat dari harga

²⁵ Fakhri Fadilah Muttaqin, "Perubahan Sosial Budaya Kerajaan Arab Saudi Sebagai Pengaruh Proxy War Dalam Konflik Suriah Tahun 2011-2018," *Himmah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* Vol. 6, No. 1 (2022): 469–89, <http://dx.doi.org/10.47313/jkik.v6i1.1781>.

²⁶ Nostalgawan Wahyudhi, "Problematika Kekuatan Politik Islam Di Arab Saudi," in *Politik Islam Di Arab Saudi, Kuwait, Dan Uni Emirat Arab*, ed. Muhammad Fakhry Ghafur (Jakarta: BRIN: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2019), 17-18.

²⁷ Riyan Hidayat & Yon Machmudi, "Perubahan Sosial Politik Di Arab Saudi 1932-1975" Vol. 4, No. 1 (2017), 3.

²⁸ National Geographic Society, "Oil Discovered in Saudi Arabia," Education: Historical Article, [Nationalgeographic.org](https://education.nationalgeographic.org/resource/oil-discovered-saudi-arabia), accessed July 3, 2023, <https://education.nationalgeographic.org/resource/oil-discovered-saudi-arabia>.

²⁹ Perang Arab-Israel disebut juga dengan Perang Yom Kippur yang melibatkan Mesir dan Suriah melawan Israel. Perang yang dimulai pada 6 Oktober 1973 berakhir pada tanggal 26 Oktober 1973 dan ditandatanganinya gencatan senjata antara Mesir dan Israel pada 11 November 1973. Disusul Suriah dan Israel pada 31 Mei 1974, lihat Kompas Cyber Media, "Sejarah Konflik dalam Hubungan Israel dengan Negara Arab," *Global, KOMPAS.com*, November 30, 2021, <https://internasional.kompas.com/read/2021/11/30/105013270/sejarah-konflik-dalam-hubungan-israel-dengan-negara-arab>.

³⁰ Penghentian sementara pengiriman minyak dari Timur Tengah ke Amerika Serikat, Belanda, Portugal, Rhodesia, dan Afrika Selatan, diberlakukan oleh negara-negara Arab penghasil minyak pada Oktober 1973 sebagai pembalasan atas dukungan Israel selama Perang Yom Kippur. Embargo terhadap Amerika Serikat dicabut pada Maret 1974, meskipun embargo terhadap negara lain tetap berlaku untuk beberapa waktu sesudahnya. Embargo minyak Arab adalah krisis minyak pertama, gangguan pasokan minyak yang menyebabkan kenaikan harga yang besar dan krisis energi di seluruh dunia. Embargo tersebut menyebabkan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat menilai kembali ketergantungan mereka pada minyak Timur Tengah. Hal tersebut juga menyebabkan perubahan luas dalam kebijakan energi dalam negeri, termasuk peningkatan produksi minyak dalam negeri di Amerika Serikat dan penekanan yang lebih besar pada peningkatan efisiensi energi, lebih lanjut lihat Adam Zeidan, "Arab Oil Embargo," *Politics, Law, and Government*, *Britannica.com*, accessed July 3, 2023, <https://www.britannica.com/event/Arab-oil-embargo>.

normal.³¹ Menguatnya ekonomi akibat melimpahnya hasil minyak bumi sebagai komoditas yang berharga di dunia mempengaruhi kebijakan-kebijakan raja-raja Arab Saudi³² selama memimpin.³³

Pada masa pemerintahan Fahd bin Abdul Aziz (w. 2005) misalnya, kemakmuran bagi rakyat dapat tercapai. Hal tersebut tidak bisa dilepaskan oleh adanya sumber minyak bumi yang meliputi 26 sumber cadangan minyak dunia yang menyumbang 75% pendapatan Saudi dan memberi kontribusi 90% dari total devisa sehingga termasuk negara yang tidak memiliki utang luar negeri. Selain minyak, Arab Saudi juga mendapat devisa dari kedatangan jamaah haji yang berasal dari berbagai belahan dunia Islam serta dari komoditas pertanian, seperti kurma, daging domba, dan susu yang biasa diusahakan oleh Arab Badawi di sekitar oase-oase.³⁴ Kebijakan terus berkembang pada masa pemerintahan Abdullah bin Abdul Aziz (w. 2015) Rachmadie dan Ediyono menyebutkan terdapat delapan kebijakan yang dilakukan Abdullah, yaitu memberikan beasiswa kepada lebih dari 130.000 pelajar Saudi yang belajar di Negara asing, 30% diantaranya adalah perempuan. Pendirian pusat dialog antar agama dan budaya Raja Abdullah bin Abdul-Aziz di Wina, Austria. Perempuan mendapatkan hak pilih pada pemilu tahun 2015. Menghabiskan lebih dari \$60 juta dalam bentuk manfaat kepada masyarakat, termasuk perumahan dan pekerjaan, sementara memperkenalkan upah minimum sebesar \$800 perbulan. Membuka universitas khusus perempuan terbesar di dunia, dengan kapasitas 12.000 mahasiswa. Menghadiahkan \$10 miliar sumbangan kepada Universitas Sains dan Teknologi Raja Abdullah. Menyelenggarakan pertemuan puncak antar-agama di tahun 2008 dan mendirikan *the King Abdullah bin Abdulaziz International Center for Interreligious and Intercultural Dialogue* (KAICIID)³⁵ bersama Republik Austria, Kerajaan Spanyol dan *the Holy See (the Vatican)* pada tahun 2011³⁶, serta menyumbangkan \$1 miliar terhadap rekonstruksi wilayah pantai Palestina yang hancur dalam perang melawan Israel di Gaza.³⁷

Wahhabisme di Arab Saudi

Wahhabisme adalah bentuk puritan dari Islam Sunni dan dipraktikkan di Arab Saudi dan Qatar, meskipun penegakannya tidak terlalu kaku di Qatar. Kata “Wahhabi” berasal dari nama seorang cendekiawan Muslim, Muhammad bin Abd al-Wahhab, yang hidup di Jazirah Arab pada abad ke-18 (1703-1792). Frustrasi oleh kemerosotan moral masyarakatnya, Abd al-Wahhab mencela banyak kepercayaan dan praktik Islam populer sebagai penyembahan berhala.

³¹ Panji Haryadi, “Peran Muhammad bin Salman terhadap Perubahan Pilar Kenegaraan Arab Saudi,” *Jurnal ICMES* Vol. 2, No. 1 (June 29, 2018), 37.

³² Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud (1932-1953, Saud bin Abdul Aziz Al Saud (1953-1964), Faisal bin Abdul Aziz Al Saud (1964-1975), Khaled bin Abdul Aziz (1975-1982), Fahd Ibn Abdul Aziz (1982-2005), dan Abdullah bin Abdul Aziz (2005-2015), lihat Muhdi, “Pendidikan Islam Di Saudi Arabia,” *Adiba: Journal of Education* Vol. 1, No. 1 (2021): 33–48.

³³ Hidayat and Machmudi, “Perubahan Sosial Politik Di Arab Saudi 1932-1975,” 3-4.

³⁴ Abdullah, “Dinamika Islam di Arab Saudi.”

³⁵ KAICIID merupakan organisasi antar pemerintah yang menyediakan ruang dialog bagi pemuka agama, pembuat kebijakan, dan pakar agar dapat menemukan solusi bersama untuk masalah bersama terkait agama dan budaya di dunia, lihat “Who We Are,” KAICIID, accessed August 14, 2023, <https://www.kaiciid.org/who-we-are>.

³⁶ Anne Hege Grung, “Interreligious Dialogue in the Squeeze between Diplomacy and Contextual Practices,” *The Journal of Interreligious Studies*, No. 21 (Oktober 2017), 39.

³⁷ Cammelianne Typhano Rachmadie & Suryo Ediono & Cammelianne Typhano Rachmadie, “Reformasi Sistem Kebudayaan Di Arab Saudi Masa Pemerintahan Raja Abdullah (2005- 2015),” *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* Vol. 2, No. 1 (2017): 41–64, <https://doi.org/10.18326/mlt.v2i1.41-64>.

Pada akhirnya, dia mendorong kembali ke praktik dasar-dasar Islam yang murni dan ortodoks, sebagaimana terkandung dalam Al-Quran dan dalam kehidupan Nabi Muhammad. Pada abad ke-18, Muhammad bin Saud, pendiri kerajaan Al-Saud modern, bekerja sama dengan Abd al-Wahhab untuk memulai proses penyatuan suku-suku yang berbeda di Jazirah Arab.³⁸

Gerakan Wahhabi banyak dipengaruhi oleh pemikiran dari Ibnu Taimiyah.³⁹ Nama Wahhabi sendiri bukan sebutan dari golongan mereka melainkan panggilan yang diberikan di luar dari golongan Wahhabi itu sendiri. Gerakan ini lebih menyebut diri mereka sebagai *Al-Muwahidûn* atau *Al-Tawhid*. Namun, nama yang mereka gunakan itu sendiri justru mencerminkan keinginan untuk menggunakan secara eksklusif prinsip tauhid yang merupakan landasan pokok Islam. Hal ini menyiratkan pengabaian terhadap seluruh kaum muslim lainnya yang mereka cap telah melakukan syirik.⁴⁰ Jadi tidak ada alasan untuk menerima monopoli atau prinsip tauhid tersebut, dan karena gerakan yang menjadi pokok pembahasan ini merupakan karya seorang manusia, yakni Muhammad bin Abd al-Wahhâb, maka cukup beralasan dan lazim untuk menyebut mereka “Wahhabisme” dan “kaum Wahhabisme”.⁴¹

Ciri dari ajaran Wahhabi adalah konsep *bid'ah* (praktik baru dalam perkara agama) yang bersifat luas dan tanpa pandang bulu. Konsep ini didefinisikan sebagai perkara baru yang tidak diakui oleh para sahabat atau pengikut (*tabiin*) dan bukan bagian dari apa yang diharapkan oleh dalil hukum (dalil syar'i). *Bid'ah* biasanya dipasangkan sebagai lawan negatif dari *sunnah*. Dengan demikian, menegakkan *sunnah* melibatkan tindakan meninggalkan *bid'ah*. Namun pemahaman yang lebih luas dan lebih positif harus dipertimbangkan. Dengan bantuan Ibnu Saud, kaum Wahhabi giat memasukan segala ajaran-ajaran mereka kepada masyarakat Arab dan menekan siapapun yang tidak patuh terhadap doktrin Wahhabisme.⁴² Pendirian agama Saudi yang didasarkan pada Wahabisme ini dipilih oleh kalangan ulama senior Wahhabi yang memiliki otoritas kuat dalam agama maupun politik.⁴³

Sejak berdirinya kerajaan modern Arab Saudi pada tahun 1932, telah terjadi hubungan yang erat antara keluarga penguasa Saudi dan lembaga agama Wahhabi. Pasukan Badui terlatih

³⁸ Christopher M. Blanchard, “The Islamic Traditions of Wahhabism and Salafiyya,” *CRS Report for Congress*, January 2007, 2.

³⁹ Saifuddin Duhri, “The Text of Conservatism: The Role of Abbas’ Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jamaah in Underpinning Acehnese Current Religious Violence,” *Studia Islamika* Vol. 23, No. 1 (2016): 44, <https://doi.org/10.15408/sdi.v23i1.2405>.

⁴⁰ Sejak kemunculannya, filosofi puritan Wahabisme telah mengakibatkan konflik dengan kelompok Muslim lainnya. Wahabisme menentang sebagian besar praktik keagamaan Islam populer seperti pemujaan orang suci, perayaan Maulid Nabi, sebagian besar tradisi inti Syiah, dan beberapa praktik yang terkait dengan ajaran mistik tasawuf. Di masa lalu, hal ini telah membawa Wahabi yang berbasis di semenanjung Arab dan di tempat lain ke dalam konfrontasi dengan Muslim Sunni non-Wahhabi, Muslim Syiah, dan non-Muslim di daerah tetangga. Kerajaan Saudi pertama dihancurkan oleh pasukan Ottoman pada awal abad ke-19 setelah prajurit yang diilhami Wahabbi merebut Mekah dan Madinah dan mengancam dominasi Ottoman. Demikian pula, selama tahun 1920-an, prajurit Badui terlatih Wahhabi bersekutu dengan pendiri kerajaan Saudi modern, Abd al Aziz ibn Saud, menyerang sesama Sunni di Arab barat dan Syiah di Irak selatan, yang menyebabkan konfrontasi politik dan keterlibatan militer dengan kerajaan Inggris.

⁴¹ Hamid Algar, *Wahabisme: Sebuah Tinjauan Kritis* (Jakarta: Paramadina, 2008), 27-28.

⁴² Yusliani Noor, *Sejarah Timur Tengah: Asia Barat Daya* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), hlm. 345-347.

⁴³ Tawfiq Alsaiif, “Relationship Between State and Religion in Saudi Arabia: The Role of Wahabism in Governance,” *Contemporary Arab Fairs* Vol. 6, No. 3 (2013): 376-403, <https://doi.org//dx.doi.org/10.1080/17550912.2013.822721>.

Wahhabi dikenal sebagai *Al-Ikhwan Man Atha'a Allah*⁴⁴ merupakan bagian integral dari kampanye militer klan Saud untuk merebut kembali dan menyatukan semenanjung Arab dari tahun 1912 sampai pemberontakan *Al-Ikhwan Man Atha'a Allah* dipadamkan secara paksa pada tahun 1930. Setelah itu, ulama Wahhabi diintegrasikan ke dalam pendirian agama dan politik kerajaan baru, dan gagasan Wahhabi membentuk dasar aturan dan hukum yang diadopsi untuk mengatur urusan sosial di Arab Saudi. Wahhabisme juga membentuk kebijakan peradilan dan pendidikan kerajaan. Buku sekolah Saudi secara historis telah mencela ajaran yang tidak sesuai dengan keyakinan Wahhabi, sebuah isu yang masih kontroversial di Arab Saudi dan di kalangan pengamat luar.

Saat ini, peta penyebaran Wahhabi setelah mendapat dukungan dari klan Saud. Gerakan Wahhabi tersebar bukan hanya di kawasan Arab, melainkan sampai ke manca negara seperti India, Sudan, Libia dan hingga ke Indonesia. Di negara ini gerakan Wahhabi di bawah oleh para ulama dan pelajar yang pulang dari menuntut ilmu di tanah Arab. Di India, ajaran Wahhabi dibawa oleh Sayid Ahmad, yaitu setelah ia menunaikan ibadah haji pada tahun 1822 dan 1823. Di India, ajaran Wahhabi mendapat pengikut-pengikut yang kemudian siap melakukan perang melawan kaum kafir dan non-muslim. Di Indonesia, ajaran Wahhabi masuk melalui kaum Paderi di Minangkabau yang dipengaruhi oleh tiga orang ulama Minangkabau, yaitu H. Sumanik berada di Lunak tanah Datar, H. Pio bang dari Lunak 50 Kota, dan H. Miskin dari Lunak Agam.⁴⁵

Dalam tradisi Islam ulama adalah orang yang memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu-ilmu keislaman. Berdasarkan atas ke ilmuwan yang dimilikinya sehingga ulama dianggap sebagai penjaga atau pewaris ajaran-ajaran Islam dan penjaga Islam itu sendiri. Otoritas sebagai penafsir dan penjaga syariat Islam ini menjadikan ulama berada di posisi yang tinggi dalam masyarakat. Dalam sebuah negara yang berasaskan Islam, para ulama menduduki berbagai posisi dalam masyarakat atau negara baik secara formal maupun informal seperti, sebagai mufti, *qadhi* (hakim), *khatib* (penceramah), *mudaris* (guru, dosen).⁴⁶ Dari informasi sejarah ini, dapat dikemukakan bahwa telah terjadi pergeseran sasaran yang ingin dicapai oleh kaum Wahhabi. Wahhabi, pada mulanya merupakan gerakan yang berupaya memurnikan tauhid, akan tetapi pada perkembangannya, paham Wahhabisme turut mempengaruhi berbagai lini kehidupan masyarakat Arab Saudi. Wahhabi berpendapat bahwa setiap agama yang dianut oleh suatu umat, dalam hal ini Islam, tidak terlepas sama sekali dari kondisi sosial masyarakat.

Modernisme Arab Saudi Era Muhammad bin Salman

Salman bin Abdul Aziz Al-Saud adalah raja Arab Saudi yang ketujuh merupakan anak ke-25 dari Ibnu Saud dan menjadi raja untuk menggantikan saudara laki-lakinya, yakni Raja

⁴⁴ *Al-Ikhwan Man Atha'a Allah* adalah bagian dari pasukan raja Abdul Aziz dan memainkan peran penting dalam penaklukan kerajaan Hijaz tahun 1924-1925.

⁴⁵ Abd A'la, "The Genealogy of Muslim Radicalism in Indonesia: A Study of the Roots and Characteristics of the Padri Movement," *Journal of Indonesian Islam* Vol. 2, No. 2 (2008): 267-99, <https://doi.org/10.15642/JIIS.2008.2.2.267-299>; Jajat Burhanudin, "The Triumph of the Second Leaders: Ahmad Khatib and Rashid Rida in Islamic Reform in Indonesia," *Journal Afkaruna* Vol.17 No.2 (Desember 2021): 171-201, <https://doi.org/doi.org/10.18196/afkaruna.v17i2.12554>.

⁴⁶ Hasib Aswar, "Ulama Dalam Dinamika Politik Kerajaan Arab Saudi," January 17, 2023, https://www.academia.edu/11029648/ulama_dalam_Dinamika_Politik_Kerajaan_Saudi.

Abdullah yang meninggal pada 25 Januari 2015. Salman menjadi Raja Arab Saudi dengan usianya menginjak 79 tahun.⁴⁷ Lazim diketahui bahwa suksesi kepemimpinan Raja Arab Saudi dilakukan setelah raja wafat. Pada umumnya pergantian dilihat berdasarkan pada senioritas dan dalam hal ini putra mahkota adalah sang adik yang melanjutkan dan memiliki kedudukan sebagai calon pengganti raja.⁴⁸ Saat ini untuk posisi putra mahkota dipegang oleh Muhammad bin Salman (MBS) sebagai putra mahkota termuda dan ambisius. Sebagai putra mahkota ia banyak membantu raja dalam mengurus pemerintahan. Nama asli putra mahkota adalah Muhammad bin Salman bin Abdulaziz Al-Saud. MBS lahir pada 31 Agustus 1985 dari seorang ibu yang bernama Fahdah binti Falah.⁴⁹ Pada tanggal 21 Juni 2017, MBS secara resmi diangkat sebagai Putra Mahkota Arab Saudi. MBS diberikan beberapa jabatan seperti Ketua Dewan Ekonomi dan Pembangunan yang membawahi beberapa kementerian antara lain kehakiman, keuangan, perekonomian, perdagangan, ketenagakerjaan, komunikasi, kebudayaan, sosial, dan pendidikan. Di bidang pertahanan, MBS ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan yang membawahi angkatan bersenjata meliputi angkatan darat, laut, dan udara. Muhammad bin Salman sebagai Kepala Dewan Tertinggi *Supreme Council of the Saudi Arabia Oil Company* (Saudi Arabco). Menurut Forbes, walaupun kekuasaan dijabat oleh Raja Salman, tetap secara *de facto* MBS lah yang lebih banyak mengambil kebijakan-kebijakan politik strategis Arab Saudi. Selain itu, MBS juga ditunjuk sebagai wakil perdana menteri kedua.⁵⁰

Secara umum telah diketahui bahwa Arab Saudi adalah negara Islam dengan konstitusi yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits. Secara historis, hubungan antara Ibnu Saud dan Abd al-Wahhab memiliki konsekuensi yang membuat Arab Saudi menjadi negara Wahhabi. Wahhabi sendiri secara umum menginginkan pembaharuan dalam Islam yang terkesan rigid, dan memiliki cara berpikir konservatif dan tekstualis terhadap instrumen-instrumen agama. Oleh karena itu, Arab Saudi dikenal sebagai negara yang kaku dan tertutup dari kehidupan modern. Di bawah kebijakan Pangeran MBS kemudian lahir *Saudi Vision 2030* yang menuntun adanya keterbukaan dan modernisasi dalam sistem kehidupan masyarakat Arab Saudi secara keseluruhan serta membawa warna yang sangat berbeda dari sebelumnya yang dinilai sebagai negara konservatif dan kaku.⁵¹

Saudi Vision 2030 merupakan sekumpulan visi yang digagas oleh MBS yang diharapkan akan menjadi wajah baru Arab Saudi pada tahun 2030. Agenda besar dari gagasan *Saudi Vision 2030* ini memiliki tiga pilar penting di dalamnya yaitu, pertama *A Vibrant Society*, yakni dalam menciptakan masyarakat yang antusias pemerintahan menawarkan pilihan hiburan

⁴⁷ Nurul Fajar & Rasyidah & Nurul Fajar, "Dinamika Sosial Kedudukan Perempuan Di Arab Saudi Era Raja Salman," *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* Vol. 10, No. 1 (2021): 47–58, <http://dx.doi.org/10.22373/takumul.v10i1.12600>.

⁴⁸ Sainul Rahman, *Arab Saudi Baru: Visi 2030, Reformasi Dan Wahabisme* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019), 42.

⁴⁹ "Adam Zaidan, "Muhammad bin Salman" <https://www.britannica.com/biography/Mohammed-bin-Salman> diakses pada 19.08.2022.

⁵⁰ Muhammad Ali, "Arab Kebijakan Militer Arab Saudi di Bawah Komando Muhammad bin Salman (MBS) Menghadapi Visi Saudi 2030", *Jurnal Middle East and Islamic Studies* Vol. 2, No. 2 Juli-Desember 2021: 1-21.

⁵¹ Adi Warsito & Serly Wulandari & Adi Warsito, "Konsep Pemerintahan Arab Saudi Dan Kebijakan Visi 2030," *Tanjak: Jurnal Sejarah Dan Peradaban Islam* Vol. 2, No. 3 (2022): 231–41, <https://doi.org/10.19109/tanjak.v2i3.14024>.

kelas dunia, kehidupan yang berkelanjutan, perawatan di masyarakat, dan sistem perawatan sosial dan kesehatan yang efisien. Namun tidak meninggalkan akar dari empat fondasi kuat yang menekankan Islam moderat, kebangsaan rasional, warisan Saudi, dan budaya Islam. Kedua, *A Triving Economy*, yakni dalam pengembangan perekonomian pemerintahan menciptakan lingkungan yang membuka peluang bisnis, memperluas basis ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja untuk semua warga Arab Saudi dengan memanfaatkan lokasi dan potensi unik Arab Saudi, menarik talenta terbaik, dan meningkatkan investasi global. Ketiga, *An Ambitious Nation*, yakni dalam mewujudkan negara yang berambisi pemerintahan menciptakan pemerintahan berkinerja tinggi yang efektif, transparan, dan akuntabel. Serta memberdayakan warga negara, sektor swasta dan nirlaba untuk mengambil inisiatif dalam mengidentifikasi peluang untuk merealisasikan tujuan agenda.⁵² Adapun tujuan dan Visi Arab Saudi 2030 ini adalah sebagai berikut.

- Meningkatkan tabungan rakyat dari 6% menjadi 10% total pendapatan rakyat.
- Mendorong kontribusi sektor non-profit terhadap PDB dari 1% menjadi 5%.
- Menampung satu juta relawan setiap tahunnya (saat ini mencapai 11.000).
- Mendapatkan pendapatan pemerintah dari sektor non-minyak dari 163 miliar Riyal menjadi satu triliun Riyal.
- Meningkatkan peringkat indeks efektifitas pemerintahan dari urutan delapan puluh ke urutan dua puluh.
- Meningkatkan indeks survey e-governance dari posisi tiga puluh enam menjadi masuk lima besar.
- Meningkatkan kontribusi sektor swasta dari 40% hingga 65% dalam PDB.
- Meningkatkan ekspor non-minyak meningkat dari 16% menjadi 50%.
- Meningkatkan aset dan investasi publik dari 600 miliar Riyal menjadi lebih dari 7 triliun Riyal.
- Menargetkan peningkatan investasi langsung asing dari 3,8 % menjadi 5,7 %.
- Meningkatkan peranan perempuan dalam lingkungan dari 20% menjadi 30%.
- Meningkatkan lokalisasi sektor Gas dan Minyak dari 40% menjadi 75%.
- Meningkatkan kapasitas jamaah Umrah dari 8 juta menjadi 30 juta jiwa pertahun.
- Meningkatkan pengeluaran atas aktivitas budaya dan hiburan dari 2,9% menjadi 6%.⁵³

Berdasarkan agenda besar *Saudi Vision 2030* yang diprakarsai oleh MBS, penulis berpendapat, bahwa MBS menginginkan tiga hal. *Pertama*, menjadikan Arab Saudi sebagai jantung dunia Arab dan Islam. *Kedua*, determinasi Arab Saudi dalam investasi global. *Ketiga*, mengubah Arab Saudi sebagai perantara bagi tiga benua yaitu Asia, Eropa, dan Afrika. Selain itu, satu hal penting tujuan dibuatnya *Saudi Vision 2030*, pada dasarnya MBS ingin meningkatkan satu hal, yakni sektor ekonomi. Faktor ekonomi mendapatkan perhatian yang

⁵² Femmyoroi Mutiara Ayu, Penny Kurnia Putri & Anak Agung Ayu Intan Parameswari, "Analisis Idiosinkratis Putra Mahkota Muhammad bin Salman atas Kebijakan Saudi Vision 2030" *Dikshi: Diskusi Hubungan Internasional* Vol. 1, No. 2 (2022): 1-15.

⁵³ Government Saudi Arabia, "Vision 2030 Saudi Arabia" (Kingdom Saudi Arabia, 2017).

khusus bagi pangeran muda tersebut karena menurutnya Arab Saudi adalah wilayah yang memiliki kesempatan yang tinggi dalam meningkatkan perekonomian selain minyak.⁵⁴ Ambisi dari MBS tersebut kemudian berimbas kepada modernisasi terhadap aspek-aspek lain, termasuk sikap beragama masyarakat Saudi yang terkenal dengan ideologi Wahhabisme.

Di bawah kebijakan MBS, perempuan dapat keluar tanpa mahramnya, bahkan mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Bioskop-bioskop menjadi terbuka, dan tempat hiburan lain seperti konser atau Arab Idol sudah mulai mudah ditemukan setelah sekian lama diperketat oleh ulama Wahhabi. Kultur Arab Saudi yang identik dengan nilai-nilai Islam Wahhabi perlahan mulai memudar⁵⁵ dan cenderung terbuka di bawah era MBS. Modernisasi yang ditunjukkan oleh pangeran muda tersebut dilakukan secara radikal, sehingga *Saudi Vision 2030* terlihat akan tercapai dengan menjadikan negara Arab yang semakin kosmopolit dan meninggalkan sifat konservatismenya.⁵⁶

Situasi ekonomi Arab Saudi yang cukup mengkhawatirkan, menjadikan pihak kerajaan memutuskan untuk membuat kebijakan reformasi dalam sektor sosial dan ekonomi yang digagas dalam *Saudi Vision 2030*. Adapun langkah-langkah reformasi tersebut dengan dirumuskannya sektor pariwisata, keterbukaan hukum, penekanan terhadap kelompok-kelompok yang menyebarkan paham ekstrimisme, pelanggaran peraturan bagi perempuan, adanya kebijakan dalam bidang pendidikan, militer, dan lain sebagainya.

Adanya kebijakan modernisasi Arab Saudi ini berangkat dari banyaknya keresahan terhadap sektor-sektor ekonomi, khususnya minyak bumi. Sehingga, banyak peluang untuk Arab Saudi membuka kebijakan reformasi dari sektor lainnya. Seperti sosial, budaya, agama, pendidikan, politik, bahkan militer. Secara garis besar, modernisasi Arab Saudi sendiri akan dihadapkan dengan sebuah kultur masyarakat yang di dalamnya sangat konservatif dan fundamentalis, baik dalam segi sosial, budaya, bahkan agama.

Hal ini dapat dikatakan bahwa kebijakan modernisasi yang diusung oleh Muhammad bin Salman dinilai bertolak belakang dengan budaya dan pikiran masyarakat di wilayah Arab Saudi. Cikal bakal untuk menjadikan Arab Saudi sebagai negara modern dan moderat saat ini perlu kerja keras untuk memperbaiki kegiatan internal maupun eksternal yang ada dalam pemerintahan dan masyarakat Arab Saudi. Sebagai negara yang selama ini dilihat konservatif mampukah Arab Saudi menerapkan hal tersebut yang mana selama ini telah menjadi budaya Arab Saudi dari jaman nenek moyang mereka.

Saat ini Wahhabi hanya bisa berdiam dan tidak dapat melakukan apa pun, karena keputusan raja telah bersifat mutlak sehingga tidak ada celah untuk mereka menyangkal, menolak, atau memberikan tanggapan terhadap keputusan yang telah dibuat tersebut. Pihak kerajaan Arab Saudi telah meningkatkan pengamanan terhadap ulama-ulama yang berusaha untuk mengkampanyekan paham-paham ekstrimisme. Paham ini bagi kerajaan Arab Saudi menjadi salah satu paham yang menghalangi masuknya Islam moderat di wilayah Arab Saudi.

⁵⁴ "Beyond Oil: Saudi Arabia's 2030 Economic Vision," Al Jazeera, 2017.

⁵⁵ Afshin Shahi Alam Saleh, "Andalusiation: Is Iran on the Trajectory of De-Islamisation?," *British Journal of Middle Eastern Studies* Vol. 42, No. 4 (2015): 500–519.

⁵⁶ Matoi, "Muhammad Bin Salman's Reforms vs Wahhabi Rules: A Challenge for the Status Quo of the Saudi State?"

Maka dari itu, pihak kerajaan akan menentang dan menindak lebih lanjut para ulama yang menyebarkan paham tersebut.

Penerapan dan pembangunan *Saudi Vision 2030* ini terkesan bahwa pihak kerajaan dengan semena-mena memanfaatkan otoritas yang dimiliki para ulama untuk mensosialisasikan visi tersebut kepada masyarakat Arab Saudi. Walaupun terdapat rasa keterpaksaan karena para ulama pun harus tunduk terhadap keputusan yang telah dibuat bekerja sama demi mewujudkan reformasi dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, dan bidang-bidang lainnya di wilayah Arab Saudi.⁵⁷

Setelah diumumkan rencana besar Arab Saudi, dunia internasional merespon dengan cukup antusias. Duta besar Inggris di Arab Saudi, Simon Collis mengatakan bahwa negaranya akan menyambut dengan baik dan terus terlibat seiring dengan implementasi *Saudi Vision* ini. Begitu pula dengan Amerika Serikat (AS) yang memberikan pernyataan bahwa mereka akan dengan senang hati ikut membantu Arab Saudi menciptakan diverifikasi ekonomi tersebut walaupun pada tahun 2021 terdapat kekhawatiran Saudi atas sikap AS yang dinilai kembali membela Qatar yang pada dasarnya Saudi dengan Qatar terdapat gesekan ekonomi-politik antar keduanya.⁵⁸ Apabila melihat dukungan yang diberikan dari negara tersebut terdapat kemungkinan Arab Saudi menjadi negara yang semakin modern dan moderat dalam hal sosial-keagamaan, namun otoritarianisme masih terlihat dalam aspek politik.⁵⁹

Kesimpulan

Arab Saudi menjadikan Wahhabisme sebagai ajaran atau gerakan yang dipercayai di negara pada pasir ini. Pengaruh dari ajaran Wahhabisme telah berakar luas di dalam pemerintahan Arab Saudi yang dikenal dengan memiliki paham atau ajaran yang sangat konservatif, tertutup, dan selalu berupaya untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Hadits. Saat kepemimpinan MBS, terdapat berbagai kebijakan modernisasi Arab Saudi yang diimplementasikan dalam *Saudi Vision 2030*. Tujuan utama dalam *Saudi Vision 2030* tersebut adalah satu, yakni sektor ekonomi. Namun demikian, sektor-sektor lain menjadi terdampak, termasuk sosial-keagamaan dan politik yang semakin terbuka. Bioskop dan tempat hiburan menjadi mudah ditemukan, wanita mendapatkan posisi dan peran penting di dalam lapangan pekerjaan dan keluar tanpa mahramnya, hal tersebut merupakan dampak dari modernisasi yang ditimbulkan oleh MBS serta keluar dari doktrin Wahhabisme. Para ulama Wahhabi yang dianggap menghalang-halangi akan dikenakan hukuman dan akan diawasi dalam mengampanyekan anti terhadap kebijakan pemerintah. Hal ini agar modernisasi yang diimplementasikan oleh Muhammad bin Salman dapat tercapai dan berjalan, walaupun banyak yang melihat pemerintahan yang dipimpinnya ini terlihat otoriter dan ambisius.

⁵⁷ Anna Zakiah Derajat & Toni Kurniawan, "Saudi Vision 2030 Dan Kebijakan Reformasi Pada Kerajaan Arab Saudi," *Global and Policy* Vol. 9, No. 1 (2021): 39–50, <https://doi.org/10.33005/jgp.v9i1.2465>.

⁵⁸ Afif & Yon Machmudi Notodewo, "Analisis Normalisasi Hubungan Arab Saudi Dengan Qatar Tahun 2021," *JISI: Jurnal Ilmu Sosial Indonesia* Vol. 3, No. 2 (2022): 56–69, <https://doi.org/10.15408/jisi.v3i2.26748>; Misliharira Shaumi, "Liberalisasi Ekonomi Arab Saudi Dalam Saudi Vision 2030," *Journal of International Relations* Vol. 7, No. 3 (2021): 123–27, <https://doi.org/10.14710/jirud.v7i3.31216>.

⁵⁹ Burdah, *Quo Vadis Dunia Arab Kontemporer? Gerakan Protes, Politik Muslim, Covid-19, Dan Arah Perubahan*; Amr Hamzawy, "Egypt's Consolidated Authoritarianism," *The Brown Journal of World Affairs* Vol. XXVI, No. 1 (2019): 73–88.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah. "Dinamika Islam di Arab Saudi." *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner* 4, no. 1 (June 30, 2019): 152–71. <https://doi.org/10.30603/jiaj.v4i1.828>.
- Al Jazeera. "Beyond Oil: Saudi Arabia's 2030 Economic Vision," 2017.
- A'la, Abd. "The Genealogy of Muslim Radicalism in Indonesia: A Study of the Roots and Characteristics of the Padri Movement." *Journal of Indonesian Islam* Vol. 2, No. 2 (2008): 267–99. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2008.2.2.267-299>.
- Alam Saleh, Afshin Shahi. "Andalusiasation: Is Iran on the Trajectory of De-Islamisation?" *British Journal of Middle Eastern Studies* Vol. 42, No. 4 (2015): 500–519.
- Alsaif, Tawfiq. "Relationship Between State and Religion in Saudi Arabia: The Role of Wahabism in Governance." *Contemporary Arab Fairs* Vol. 6, No. 3 (2013): 376–403. <https://doi.org//dx.doi.org/10.1080/17550912.2013.822721>.
- Ankersmit, F.R. *Refleksi Tentang Sejarah: Pendapat-Pendapat Modern Tentang Filsafat Sejarah*. Terjemahan Dick Hartono. Jakarta: PT Gramedia, 1987.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah Abad XVII-XVIII*. Perennial. Jakarta: Kencana, 2016.
- Burdah, Ibnu. *Quo Vadis Dunia Arab Kontemporer? Gerakan Protes, Politik Muslim, Covid-19, Dan Arah Perubahan*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020.
- Burhanudin, Jajat. "The Triumph of the Second Leaders: Ahmad Khatib and Rashid Rida in Islamic Reform in Indonesia." *Journal Afkaruna* Vol.17 No.2 (Desember 2021): 171–201. <https://doi.org/doi.org/10.18196/afkaruna.v17i2.12554>.
- Choksy, Carol E.B and Jamshed K Choksy. "The Saudi Connection: Wahhabism and Global Jihad." *World Affairs* Vol. 178, No. 1 (2015): 23–34.
- Christopher M. Blanchard. "The Islamic Traditions of Wahhabism and Salafiyya." *CRS Report for Congress*, January 2007.
- Derajat, Toni Kurniawan & Anna Zakiah. "Saudi Vision 2030 Dan Kebijakan Reformasi Pada Kerajaan Arab Saudi." *Global and Policy* Vol. 9, No. 1 (2021): 39–50. <https://doi.org/10.33005/jgp.v9i1.2465>.
- Dhuhri, Saifuddin. "The Text of Conservatism: The Role of Abbas' Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jamaah in Underpinning Acehese Current Religious Violence." *Studia Islamika* Vol. 23, No. 1 (2016): 20–59. <https://doi.org/10.15408/sdi.v23i1.2405>.
- Fajar, Rasyidah & Nurul. "Dinamika Sosial Kedudukan Perempuan Di Arab Saudi Era Raja Salman." *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* Vol. 10, No. 1 (2021): 47–58. <http://dx.doi.org/10.22373/takamul.v10i1.12600>.
- Fullbrook, Mary. *Historical Theory*. USA: Routledge, 2002.
- Goorha, Prateek. "Modernization Theory." *Oxford Research Encyclopedia*, 2010, 1–24. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.266>.
- Government Saudi Arabia. "Vision 2030 Saudi Arabia." Kingdom Saudi Arabia, 2017.
- Hamdani, Abu Yazid. "Debut Politik Muhammad Ibn Abdul Wahhab & Muhammad Ibn Saud." *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuludin* Vol. 1, No. 2 (2019): 176–84. <https://doi.org//doi.org/10.32939/ishlah.v1i2.38>.
- Hamid Algar. *Wahabisme: Sebuah Tinjauan Kritis*. Jakarta: Paramadina, 2008.

- Hamzawy, Amr. "Egypt's Consolidated Authoritarianism." *The Brown Journal of World Affairs* Vol. XXVI, No. 1 (2019): 73–88.
- Haryadi, Panji. "Peran Muhammad bin Salman terhadap Perubahan Pilar Kenegaraan Arab Saudi." *Jurnal ICMES* 2, no. 1 (June 29, 2018): 25–47. <https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v2i1.16>.
- Hasib Aswar. "Ulama Dalam Dinamika Politik Kerajaan Arab Saudi," January 17, 2023. https://www.academia.edu/11029648/ulama_dalam_Dinamika_Politik_Kerajaan_Saudi.
- Hendriyadi. "Wahabisme: Gerakan Revivalist Islam." *Tafhim Al-Ilmi* Vol. 11, No. 2 (2020): 324–33. <https://doi.org/10.37459/tafhim.v11i2.3759>.
- Hidayat, Riyan, and Yon Machmudi. "Perubahan Sosial Politik Di Arab Saudi 1932-1975" 4, no. 1 (2017): 1–21.
- Hikmah, Abrar & Citra Nur. "Saudi Vision: Reformasi Ekonomi Arab Saudi." *Periode: Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah* Vol. 1, No. 1 (2019): 27–39.
- Hitti, Phillip K. *History of The Arabs*. Jakarta: Serambi, 2008.
- Holdo, Markus. "Post-Islamism and Fields of Contention After the Arab Spring: Feminism, Salafism and the Revolutionary Youth." *Third World Quarterly* Vol. 38, no. 8 (2016): 1800–1815. <https://doi.org/10.1080/01436597.2016.1233492>.
- Jahroni, Jajang. "Ritual, Bid'ah, and Negotiation of the Public Sphere in Contemporary Indonesia." *Studia Islamika* Vol. 25, No. 1 (2018): 1–36. <https://doi.org/10.15408/sdi.v25i1.5308>.
- . "Saudi Arabia Charity and the Institutionalization of Indonesian Salafism." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* Vol. 58, No. 1 (2020): 35–62. <https://doi.org/10.14421/ajis.2020.581.35-62>.
- Karim, M. Abdul. *Bulan Sabit Di Gurun Gobi: Sejarah Dinasti Mongol-Islam Di Asia Tengah*. Yogyakarta: Suka Press, 2014.
- . *Sejarah Pemikiran Dan Peradaban Islam*. Cetakan ke-VIII. Yogyakarta: Pustaka Book, 2019.
- Karim, Muhammad Abdul. "Baghdad's Fall and Its Aftermath: Contesting the Central Asian Political Background and the Emergence of Islamic Mongol Dynasties." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* Vol. 56, No. 1 (2018): 187–224. <https://doi.org/10.14421/ajis.2018.561.187-224>.
- Lapidus, M. Ira. *Sejarah Sosial Umat Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Machasin. *Dari Dakwah Ke Khilafah: Perjalanan Islam Dari Seruan Perbaikan Sosial Sampai Terbentuknya Kekuasaan Politik*. Yogyakarta, 2018.
- Madjid, Dien dan Johan Wahyudi. *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014.
- Matoi, Ecaterina & Diana Monica. "Muhammad Bin Salman's Reforms vs Wahhabi Rules: A Challenge for the Status Quo of the Saudi State?" *Strategies XXI: International Scientific Conference* Vol. 14, No. 15 (November 2019): 235–48.
- Media, Kompas Cyber. "Sejarah Konflik dalam Hubungan Israel dengan Negara Arab." Global. KOMPAS.com, November 30, 2021.

- <https://internasional.kompas.com/read/2021/11/30/105013270/sejarah-konflik-dalam-hubungan-israel-dengan-negara-arab>.
- Muhdi. "Pendidikan Islam Di Saudi Arabia." *Adiba: Journal of Education* Vol. 1, No. 1 (2021): 33–48.
- Muttaqin, Fakhri Fadilah. "Perubahan Sosial Budaya Kerajaan Arab Saudi Sebagai Pengaruh Proxy War Dalam Konflik Suriah Tahun 2011-2018." *Himmah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* Vol. 6, No. 1 (2022): 469–89. <http://dx.doi.org/10.47313/jkik.v6i1.1781>.
- Notodewo, Afif & Yon Machmudi. "Analisis Normalisasi Hubungan Arab Saudi Dengan Qatar Tahun 2021." *JISI: Jurnal Ilmu Sosial Indonesia* Vol. 3, No. 2 (2022): 56–69. <https://doi.org/10.15408/jisi.v3i2.26748>.
- Rachmadie, Suryo Ediono & Cammelianne Typhano. "Reformasi Sistem Kebudayaan Di Arab Saudi Masa Pemerintahan Raja Abdullah (2005- 2015)." *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* Vol. 2, No. 1 (2017): 41–64. <https://doi.org/10.18326/mlt.v2i1.41-64>.
- Rahman, Sainul. *Arab Saudi Baru: Visi 2030, Reformasi Dan Wahabisme*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- Rohmaniyah, Inayah & Mark Woodward. "Wahhabism, Identity and Secular Ritual: Graduation at an Indonesian High School." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* Vol. 50, No. 1 (2012): 119–46. <https://doi.org/doi.org/10.14421/ajis.2012.501.119-145>.
- Shaumi, Misliharira. "Liberalisasi Ekonomi Arab Saudi Dalam Saudi Vision 2030." *Journal of International Relations* Vol. 7, No. 3 (2021): 123–27. <https://doi.org///doi.org/10.14710/jirud.v7i3.31216>.
- Society, National Geographic. "Oil Discovered in Saudi Arabia." Education: Historical Article. Nationalgeographic.org. Accessed July 3, 2023. <https://education.nationalgeographic.org/resource/oil-discovered-saudi-arabia>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Wahyuddin, Imam. "Perkembangan Islam Arab Saudi." *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* Vol. 10, No. 2 (2018): 423–41.
- Wahyudhi, Nostalgawan. "Problematika Kekuatan Politik Islam Di Arab Saudi." In *Politik Islam Di Arab Saudi, Kuwait, Dan Uni Emirat Arab*, edited by Muhammad Fakhry Ghafur. Jakarta: BRIN: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2019. <https://penerbit.brin.go.id/press>.
- Warsito, Serly Wulandari & Adi. "Konsep Pemerintahan Arab Saudi Dan Kebijakan Visi 2030." *Tanjak: Jurnal Sejarah Dan Peradaban Islam* Vol. 2, No. 3 (2022): 231–41. <https://doi.org/10.19109/tanjak.v2i3.14024>.
- Yusliani Noor. *Sejarah Timur Tengah: Asia Barat Daya*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Zeidan, Adam. "Arab Oil Embargo." *Politic, Law, and Government*. Britannica.com. Accessed July 3, 2023. <https://www.britannica.com/event/Arab-oil-embargo>.